



LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2025



www.ditjenpkhpertanian.go.id



Ditjen peternakan dan kesehatan hewan



Ditjen PKH kementan RI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025" dapat terselesaikan. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 menyampaikan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai penjabaran dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Laporan Tahunan ini menginformasikan gambaran umum capaian kinerja makro subsektor peternakan dalam mendukung perekonomian nasional sebagai hasil pelaksanaan program/ kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Capaian indikator kinerja tersebut antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), Kinerja Ekspor, Investasi dan Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT). Selain itu, juga menginformasikan populasi dan produksi komoditas peternakan, kinerja pendukungnya sebagai dukungan pada aspek ketahanan pangan asal hewan, serta pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas Laporan Tahunan di masa mendatang. Semoga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si
NIP. 197611252003121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	9
B. Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ..	10
C. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
D. Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	14
E. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	17
F. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	20
BAB II KINERJA MAKRO PETERNAKAN	24
1. Populasi	27
2. Produksi Daging	28
3. Produksi Susu	29
4. Produksi Susu	29
BAB III KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025	31
A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	32
1. Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging	32
2. Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi	33
3. Pengembangan Ayam Petelur	37
4. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku	38
B. Kinerja Pelaksanaan Anggaran	40
1. Kinerja Anggaran Tahun 2025	40
2. Kinerja Peningkatan Produksi Pakan Ternak	41
3. Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	42
4. Kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	49
5. Kinerja Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	52
6. Kinerja Hilirisasi Hasil Peternakan	54
7. Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	58
C. Penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025	59

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	59
2. Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025	59
3. <i>Cashless Award</i> Kementerian Pertanian Kategori Eselon I	60
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Ditjen PKH Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 2	Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025.....	28
Tabel 3	Populasi Ternak Nasional Tahun 2024-2025.....	29
Tabel 4	Realisasi Produksi Daging Tahun 2020-2025.....	30
Tabel 5	Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2025.....	31
Tabel 6	Realisasi Produksi Susu Tahun 2020-2025.....	31
Tabel 7	Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Kewenangan.	41
Tabel 8	Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	41
Tabel 9	Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Kegiatan	42
Tabel 10	Target dan Realisasi Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2025.....	44
Tabel 11	Realisasi Vaksinasi <i>Lumpy Skin Disease</i> Tahun 2025.....	45
Tabel 12	Realisasi Vaksinasi <i>Rabies</i> Tahun 2025.....	46
Tabel 13	Realisasi Vaksinasi <i>Anthraks</i> Tahun 2025.....	47
Tabel 14	Realisasi Vaksinasi <i>Septicaemia Epizootica</i> Tahun 2025.....	48
Tabel 15	Realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025.....	49
Tabel 16	Realisasi Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan Tahun 2025...	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029.....	9
Gambar 2	Alokasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2025.....	19
Gambar 3	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	21
Gambar 4	Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2025.....	23
Gambar 5	Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian dan Subsektor Peternakan Tahun 2024-2025.....	25
Gambar 6	Nilai Tukar Petani Peternakan Tahun 2024-2025.....	26
Gambar 7	Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024-2025.....	27
Gambar 8	Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025.....	34
Gambar 9	Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025.....	39
Gambar 10	Realisasi Vaksinasi PMK Tahun 2025.....	40
Gambar 11	Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025.....	57
Gambar 12	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025....	61
Gambar 13	Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025..	62
Gambar 14	<i>Cashless Award</i> Kementerian Pertanian Kategori Eselon I.....	62
Gambar 15	Penghargaan Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun 2025.....	69
Lampiran 2	Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun 2025.....	70
Lampiran 3	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2025.....	71
Lampiran 4	Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2025.....	72
Lampiran 5	Capaian Kinerja Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025.....	73
Lampiran 6	Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2025.....	74



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN



BAB I PENDAHULUAN



A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Selanjutnya dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”

Selanjutnya dalam mewujudkan Visi Ditjen PKH tahun 2025-2029, maka Ditjen PKH telah menetapkan Visi tahun 2025-2029, yaitu:

MISI

- ✓ Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat
- ✓ Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

B. Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merupakan upaya strategis yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategis Kementerian Pertanian, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029, tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu: 1) pertumbuhan volume usaha peternakan; 2) kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan; 3) nilai tambah dan daya saing produk peternakan; dan 4) kesehatan masyarakat dari penyakit hewan dan produk hewan



Gambar 1. Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 1 adalah hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan 1) pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan, dan 2) perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas *market share* produk peternakan Indonesia.

2. Pilar Strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman.

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices*, *Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 2 adalah produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional, dengan kegiatan 1) pelestarian sumber daya genetik (SDG) ternak, 2) pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas, 3) memastikan ketersediaan pakan yang aman, bermutu dan terjangkau, 4) pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak, dan 5) penjaminan keamanan dan mutu produk peternakan.

3. Pilar strategis 3: Pengolahan Hasil Peternakan

Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Hal ini dilaksanakan antara lain dengan: a) penanganan pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk dengan tujuan meningkatkan nilai tambah; b) integrasi hulu hilir dari penyediaan input produksi, budidaya, pasca panen pengolahan, penjaminan mutu dan pemasaran dengan tujuan memperkuat rantai nilai; c) pengembangan pasar baik domestik maupun ekspor. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 3 adalah hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan 1) pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi, dan 2) meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan.

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular, Zoonosis, keamanan produk hewan serta menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat mengganggu Kesehatan manusia, produksi pangan asal hewan, dan ketahanan pangan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 4 adalah penegakan sistem kesehatan hewan nasional, dengan kegiatan 1) kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan, 2) ketahanan dari penularan penyakit hewan, dan 3) peningkatan kesadaran masyarakat dari penyakit hewan.

C. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana terurai diatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program.

Tahun 2025-2029, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) program yaitu i) Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, ii) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan iii) Dukungan Manajemen dengan rincian Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP) disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Program, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Ditjen PKH Tahun 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Daging (juta ton)	4,97	5,12	5,28	5,44	5,60
		Produksi Telur (juta ton)	7,44	7,75	8,08	8,43	8,79
		Produksi Susu (ribu ton)	866,28	893,96	922,45	939,55	943,64
	Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan	Indeks Keamanan Komoditas Peternakan (Indeks)	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70
	Terkendalinya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan	Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan (%)	80,00	80,30	80,60	85,00	90,00
	Terkendalinya Wilayah dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia (%)	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak	Indeks Harga yang Diterima Peternak (Indeks)	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41
	Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan	Indeks Mutu Komoditas Peternakan (Indeks)	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
	Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Volume Ekspor Komoditas Peternakan (ton)	499.432	514.415	540.136	567.143	595.500
	Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi	Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan (Indeks)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Indeks)	0,885	0,887	0,891	0,895	0,899

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029

D. Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

1

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan
- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan
- Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan

2

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan
- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan
- Layanan Kesehatan Hewan
- Hasil Uji Mutu Obat Hewan
- Sampel Penyakit Hewan yang Teramati dan Teridentifikasi
- Sarana Bidang Kesehatan Hewan
- Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi
- SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia
- SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah
- SBSN Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia
- SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah
- Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia

3 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak
- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak
- Benih Ternak Unggul
- Bibit Ternak Unggul
- Bantuan Ternak Ruminansia Potong
- Bantuan Ternak Unggas
- Bantuan Ternak Lainnya
- Sarana Perbibitan Ternak
- SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari
- Prasarana Perbibitan Ternak
- SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner (4 Unit)

5 Hilirisasi Hasil Peternakan

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- Layanan BMN
- Layanan Hukum
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Umum
- Layanan Data dan Informasi
- Layanan Bantuan Hukum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Manajemen SDM
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- Layanan Manajemen Keuangan

E. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

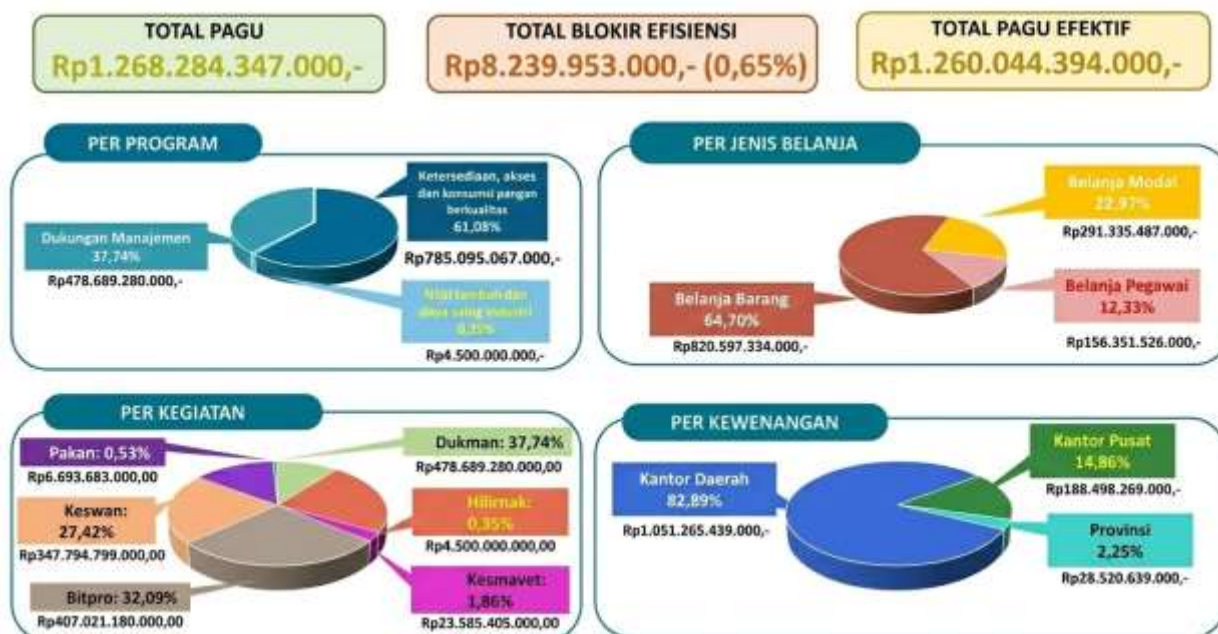
Pagu anggaran awal Program/Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar Rp1.268.284.347.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp8.239.953.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) sehingga total pagu efektif sebesar Rp1.260.044.394.000,- (*satu triliun dua ratus enam puluh miliar empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat perubahan pagu anggaran, yaitu:

1. Pagu Diitjen PKH pada DIPA Awal yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar sebesar Rp1.213.291.406.000,00.
2. Revisi I dalam rangka penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) karena kenaikan kejadian kasus PMK sejak bulan November 2024 sehingga sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi I sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-12/AG/AG.3/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-1).
3. Revisi II yaitu revisi dalam rangka penyesuaian komponen penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berupa operasional pelaporan vaksinasi menjadi insentif operasional vaksinasi serta implementasi blokir perjadiin sesuai hasil penelaahan RKA-K/L sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi II sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-30/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-2).
4. Revisi III yaitu dalam rangka i) Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2025 sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025, dan ii) Buka blokir terkait pemenuhan dokumen Persetujuan DPR dan RBA BLU pada Satker BLU dan Satker Pelaksana SBSN T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi III sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-63/AG/AG.3/2025 tanggal 19 Februari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-3).
5. Revisi IV yaitu Revisi Buka Blokir dan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual pada RO Layanan Kesehatan Hewan senilai Rp6.400.000.00000 digunakan untuk pemenuhan kekurangan anggaran insentif vaksinasi PMK, obat dan vitamin serta petugas pelaporan sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IV sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran

- Kementerian Keuangan Nomor S-258/AG/AG.3/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-4).
6. Revisi V yaitu Revisi sebagai tindak lanjut Surat Bapak Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi V sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-320/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-5).
 7. Revisi VI yaitu Buka Blokir Anggaran sebagai tindak lanjut Surat Bapak Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VI menjadi Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-434/AG/AG.3/2025 tanggal 6 Mei 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-6).
 8. Revisi VII yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Plt. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Pertanian Nomor B-1997/RC.110/A/05/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Permohonan Relaksasi Blokir Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VII sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-542/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-7).
 9. Revisi VIII yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Nomor B-3270/RC.110/A/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Revisi/ Realokasi Anggaran untuk Peningkatan Produksi Jagung T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VIII sebesar Rp1.239.992.348.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-659/AG/AG.3/2025 tanggal 5 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-8).
 10. Revisi IX yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-008528/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.08/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 hal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IX sebesar Rp1.239.992.348.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-728/AG/AG.3/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-9).

11. Revisi X yaitu Revisi sebagai pemenuhan belanja operasional sesuai dengan kebutuhan satker untuk memenuhi kekurangan belanja operasional pegawai sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi X sebesar Rp1.245.513.069.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-791/AG/AG.3/2025 tanggal 18 September 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-10).
12. Revisi XI yaitu Revisi dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari senilai Rp10.320.200.000,00 dimanfaatkan untuk pengadaan sarana mendukung kelengkapan kegiatan utama senilai Rp4.010.400.000,00 dan pengadaan prasarana pendukung senilai Rp6.309.800.000,00 sesuai surat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15795/D.09.04/PD.05/09/2025 tanggal 15 September 2025 hal Pemanfaatan Sisa Anggaran SBSN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi XI sebesar Rp1.257.359.602.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-820/AG/AG.3/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-11).
13. Revisi XII yaitu Revisi dalam rangka buka blokir anggaran, pergeseran anggaran belanja operasional, dan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan operasional RO SBSN, serta pergeseran anggaran insentif PMK untuk mendukung rencana pembebasan PMK di Pulau Madura sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi XII sebesar Rp1.267.235.228.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-950/AG/AG.3/2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-12).

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2025, pagu Ditjen PKH menjadi Rp1.268.284.347.000,00 atau meningkat 4,53% dari pagu awal dengan jumlah pagu blokir sebesar Rp8.239.953.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada 62 (enam puluh dua) satuan kerja, dengan rincian 1 (satu) Satker Kantor Pusat, 23 (dua puluh tiga) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Tugas Pembantuan (TP). Proporsi anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp1.051.265.439.000,00 (82,89%), berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp820.597.334.000,00 (64,70%), dan berdasarkan kegiatan terdapat pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp478.689.280.000,00 (37,74%).



Sumber: website SATU DJA, Kementerian Keuangan, diakses pada 31 Desember 2025

Gambar 2. Alokasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2025

F. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 191, dengan susunan organisasi terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
- Direktorat Pakan.
- Direktorat Kesehatan Hewan.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2025 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Ditjen PKH dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 2.993 orang pegawai yang tersebar di 1 Kantor Pusat sebanyak 565 orang pegawai dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 2.428 orang pegawai dengan uraian sebagai berikut:

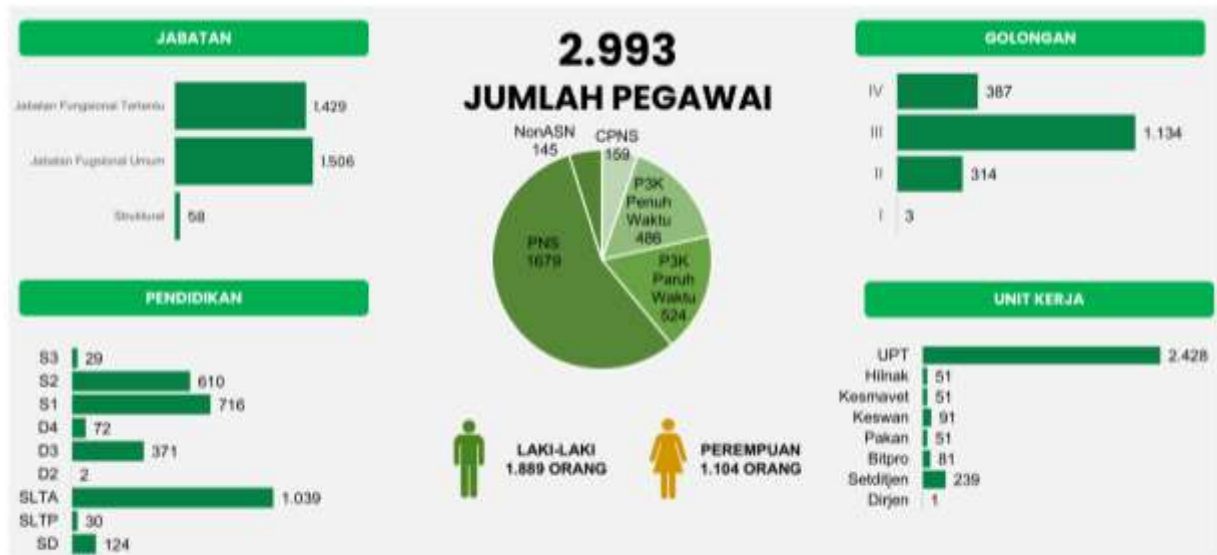
1. Distribusi Status Kepegawaian

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.679 orang pegawai dengan sebaran 356 orang pada Kantor Pusat dan 1.323 orang pada UPT.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 159 orang pegawai dengan sebaran 46 orang pada Kantor Pusat dan 113 orang pada UPT.
- c. Berdasarkan klasifikasi pola waktu kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbagi menjadi dua, yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. PPPK Penuh Waktu sebanyak 486 orang pegawai dengan sebaran 121 orang pada Kantor Pusat dan 365 orang pada UPT; dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 524 orang pegawai dengan sebaran 23 orang pada Kantor Pusat dan 501 orang pada UPT.
- d. *Outsourcing*/Non-ASN sebanyak 145 orang pegawai dengan sebaran 19 orang pada Kantor Pusat dan 126 orang pada UPT.

2. Distribusi per Unit Kerja

- a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 565 orang yang terdiri dari Direktorat Jenderal sebanyak 1 orang; Sekretariat Ditjen sebanyak 239 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 81 orang; Direktorat Pakan sebanyak 51 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 91 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 51 orang, dan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebanyak 51 orang.
 - b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 2.428 orang yang tersebar pada 23 UPT.
3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 1.889 orang dan perempuan sebanyak 1.104 orang.
 4. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 387 orang; Golongan III sebanyak 1.134 orang; Golongan II sebanyak 314 orang; dan Golongan I sebanyak 3 orang.
 5. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 29 orang; S-2 sebanyak 609 orang; S-1 sebanyak 719 orang; D-4 sebanyak 73 orang; D-3 sebanyak 375 orang; D-2 sebanyak 2 orang; SLTA sebanyak 1.034 orang; SLTP sebanyak 30 orang; dan SD sebanyak 122 orang.
 6. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Struktural sebanyak 58 orang; Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 1.506 orang; Medik Veteriner sebanyak 411 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 316 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 175 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 216 orang; Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) lainnya sebanyak 311 orang.

Jumlah pegawai Ditjen PKH tahun 2025 sebanyak 2.993 orang jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 1.796 orang mengalami kenaikan sebanyak 1.197 orang atau 66,65%. Kenaikan jumlah pegawai disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK Tahap I dan Tahap II, PPPK Paruh Waktu dan *outsourcing* dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan tenaga non-ASN.



Sumber: Sekretariat Ditjen PKH, data diolah, 2 Januari 2026.

Gambar 4. Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

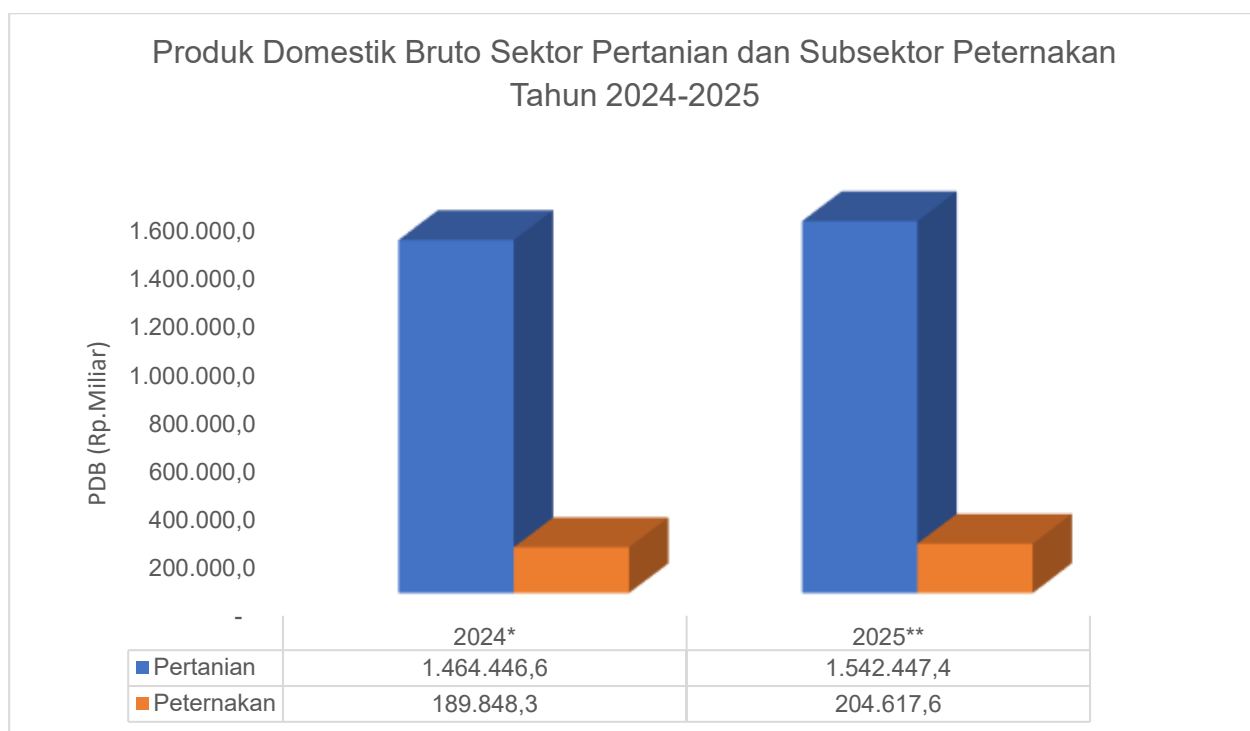


BAB II KINERJA MAKRO PETERNAKAN



A. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2010

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), PDB atas harga konstan Subsektor Peternakan tahun 2025** (Angka Sangat Sementara) sebesar Rp.204.617,6 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 7,78% dibandingkan tahun 2024* (Angka Sementara). Berdasarkan PDB atas harga konstan, nilai PDB Pertanian tahun 2025 sebesar Rp.1.542,447,4 miliar atau meningkat 0,67% dari tahun 2024.



Sumber: BPS. *) Angka Sementara. **) Angka Sangat Sementara

Gambar 5. Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian dan Subsektor Peternakan Tahun 2024-2025

B. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) merupakan proksi kesejahteraan petani peternak yang diperoleh dengan cara membandingkan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi NTPT, maka relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani peternak.

Rata-rata NTPT tahun 2025 sebesar 101,49 sedangkan rata-rata NTPT tahun 2024 sebesar 102,48 atau mengalami penurunan sebesar 0,97% dibandingkan tahun 2024.

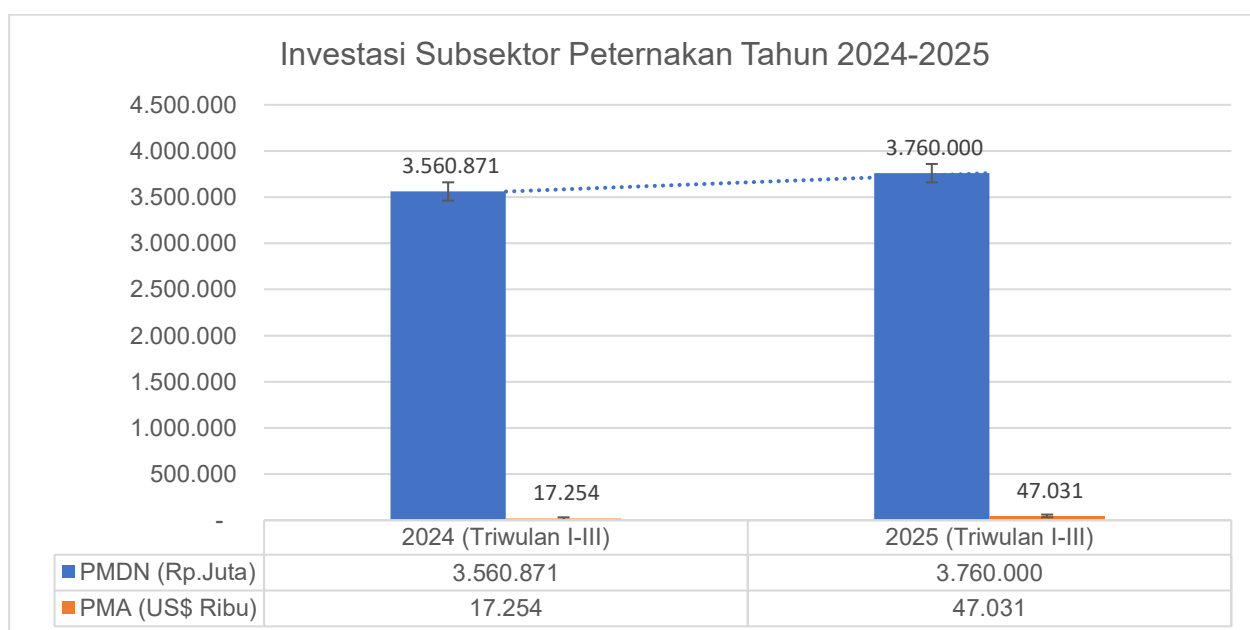


Sumber: BPS

Gambar 6. Nilai Tukar Petani Peternakan Tahun 2024-2025

C. Investasi Subsektor Peternakan

Investasi Subsektor Peternakan terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2025 sebesar Rp 3,76 triliun atau tumbuh sebesar 5,59% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 (c to c). Investasi PMA secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2025 sebesar US\$ 47,03 juta atau tumbuh sebesar 172,82% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 (c to c).



Sumber: BKPM

Gambar 7. Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024-2025

D. Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia maka kebutuhan akan pangan hewani, produk peternakan dan kesehatan hewan akan terus meningkat. Demikian juga persaingan antar produsen komoditas peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan.

Realisasi Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton (angka tetap bulan November 2025), jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 531.329 ton, maka capaian indikator mencapai 110,00%. Realisasi indikator kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton atau meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 489.640. Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025

Kelompok Komoditas	Realisasi 2024		Realisasi 2025*	
	Volume (Ton)	Nilai (USD 000)	Volume (Ton)	Nilai (USD 000)
Hewan Hidup	250	5.414	394	7.976
Produk Pangan	279.233	1.074.988	309.142	983.698
Produk Non Pangan	162.896	205.151	75.244	131.077
Obat Hewan	46.216	65.673	213.271	236.066
Bibit Dan Benih	1.045	3.030	1.240	4.136
TOTAL	489.640	1.354.256	599.291	1.362.953

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah Pusdatin Kementan, 2025

*) Angka Tetap November 2025

E. Populasi dan Produksi Peternakan

1. Populasi

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan itik manila). Perkembangan populasi ternak nasional periode tahun 2024-2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Populasi Ternak Nasional Tahun 2024-2025

000 Ekor/000 Head

No	Jenis/ Species	Tahun/Year		Pertumbuhan r
		2024	2025 ^{a)}	2024-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK			
1	Sapi Potong/Beef Cattle	13.268	13.549,9	2,12
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	491	499,4	1,79
3	Kerbau/Buffalo	731	755,5	3,37
4	Kuda/Horse	140	142,0	1,68
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK			
1	Kambing/Goat	15.439	15.824,3	2,50
2	Domba/Sheep	9.035	9.148,9	1,26
3	Babi/Pig	3.650	3.773,6	3,38
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES			
1	Ayam Buras/Native Chicken	169.203	171.085,5	1,11
2	Ayam Ras Petelur/Layer	415.330	426.122,2	2,60
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.205.417	3.323.003,8	3,67
4	Itik/Duck	36.587	37.913,4	3,63
5	Itik Manila/Muscovy Duck	7.315	7.416,8	1,39
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK			
1	Kelinci/Rabbit	619	629,9	1,69
2	Puyuh/Quail	19.927	20.210,0	1,42

Sumber: Buku Statistik PKH 2025

2. Produksi Daging

Subsektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging, ayam lokal dan itik), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk daging sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dihitung dari daging murni, jeroan, dan daging variasi (bagian yang dapat dimakan di kaki bawah, kepala, dan ekor). Daging ayam ras pedaging dihasilkan dari produksi karkas, serta ayam lokal dan itik dihasilkan dari produksi karkas dan jeroan.

Realisasi produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras pedaging, ayam lokal dan itik) tahun 2025 sebesar 5,04 juta ton atau 101,27% dari target tahun

2025 sebesar 4,97 juta ton. Realisasi indikator kinerja Produksi Daging tahun 2025 adalah 5,04 juta ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi daging tahun 2024 sebesar 4,85 juta ton, maka realisasi kinerja produksi daging meningkat 0,18 juta ton atau 3,74%. Realisasi Produksi Daging Tahun 2020-2025 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Produksi Daging Tahun 2020-2025 (dalam juta ton)

No	Jenis Ternak	Tahun						r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Sapi	0,3397	0,3655	0,3744	0,4613	0,4702	0,4991	6,15
2	Kerbau	0,0139	0,0142	0,0165	0,0162	0,0180	0,0164	-8,67
3	Kambing	0,0419	0,0405	0,0412	0,0563	0,0530	0,0610	15,09
4	Domba	0,0371	0,0347	0,0357	0,0482	0,0287	0,0297	3,28
5	Babi	0,1898	0,1760	0,1025	0,1350	0,1303	0,1177	-9,62
6	Ayam Buras	0,2702	0,2698	0,2767	0,1438	0,2107	0,2112	0,26
7	Ayam Ras Pedaging	3,2191	3,1857	3,6689	3,7216	3,9054	4,0612	3,99
8	Itik	0,0358	0,0410	0,0446	0,0330	0,0378	0,0393	4,04
Jumlah		4,1474	4,1274	4,5606	4,6155	4,8541	5,0357	3,74

Sumber: Data Statistik PKH, 2025;

Keterangan: *) Angka Sementara; r (%): pertumbuhan produksi tahun 2025

3. Produksi Susu

Realisasi produksi telur (ayam lokal, ayam ras petelur, itik, itik manila, dan puyuh) tahun 2025 sebesar 6,91 juta ton atau 92,90% dari target tahun 2025 sebesar 7,44 juta ton. Realisasi indikator kinerja Produksi Telur tahun 2025 adalah 6,91 juta ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi telur tahun 2024 sebesar 6,72 juta ton, maka kinerja produksi telur meningkat 0,19 juta ton atau 2,81%. Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2025

No	Jenis Ternak	Tahun						r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025*	
1	Ayam Lokal	0,3589	0,3687	0,3893	0,2147	0,2731	0,2729	(0,07)
2	Ayam Ras Petelur	5,1416	5,1560	5,5792	6,1161	6,1345	6,3135	2,92
3	Itik	0,3170	0,3138	0,3162	0,2002	0,2489	0,2585	3,88
4	Itik Manila	0,0246	0,0243	0,0220	0,0262	0,0313	0,0315	0,59
5	Puyuh	0,0335	0,0306	0,0332	0,0283	0,0312	0,0315	1,04
Jumlah		5,8755	5,8934	6,3399	6,5855	6,7190	6,9080	2,81

Sumber: Data Statistik PKH, 2025;

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam juta ton)

4. Produksi Susu

Realisasi produksi susu tahun 2025 sebesar 820,87 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 866,28 ribu ton, maka capaian Produksi Susu sebesar 94,76%. Realisasi indikator kinerja Produksi Susu tahun 2025 adalah 820,87 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi susu tahun 2024 sebesar

809,04 ribu ton, maka kinerja produksi susu meningkat 11,83 ribu ton atau 1,46%. Realisasi Produksi Susu tahun 2020-2025 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Produksi Susu Tahun 2020-2025

No	Jenis Komoditas (000 ton)	Tahun						r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025*)	
1	Susu Sapi	946,91	946,39	824,27	787,37	809,04	820,87	1,46

Sumber: Statistik PKH 2025

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam ribu ton)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN



BAB III KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025



Kinerja Strategis

A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian melakukan upaya peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong dengan meningkatkan investasi oleh pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan populasi ini ditargetkan dengan penambahan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging pada tahun 2025.

Untuk mendukung percepatan penyediaan daging dan susu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging berdasarkan Keputusan Nomor 3222/Kpts/OT.050/F/03/2025.

Target penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging tahun 2025 adalah sebanyak 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging. Perkembangan investasi sapi perah dan sapi pedaging oleh pelaku usaha pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025-2029 adalah 998.565 ekor dari 196 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 577.103 ekor dari 84 pelaku usaha.
2. Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025 adalah 48.754 ekor dari 193 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 52.594 ekor dari 86 pelaku usaha.
3. Rencana pemasukan sapi perah pada bulan Januari 2026 sebanyak 1.808 ekor dari 2 pelaku usaha dan sapi pedaging sebanyak 6.537 ekor dari 16 pelaku usaha.
4. Realisasi pemasukan sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sejumlah 13.544 ekor sapi perah dari 72 pelaku usaha dan 20.411 ekor sapi pedaging dari 68 pelaku usaha.
5. Investor, baik pendanaan yang berasal dari PMA maupun PMDN, telah berupaya untuk berkomitmen dalam mengembangkan usaha peternakan sapi namun dalam prosesnya terkendala beberapa hal, antara lain: a) ketersediaan lahan sesuai kebutuhan investor yg *clear and clean*, b) biaya sewa lahan yang tidak *feasible* untuk investasi sapi, c) kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air, telekomunikasi), d) kurangnya dukungan K/L, e) keterbatasan sapi perah dan sapi pedaging betina produktif di Australia, f) mahalanya transportasi sapi dari negara selain Australia (NZ, Brazil, dan Amerika), dan g) belum menemukan lahan yang cocok untuk rencana alokasi.





Gambar 8. Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025

2. Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi dirancang sebagai sebuah kerangka pembangunan komprehensif yang menghubungkan seluruh rantai nilai perunggasan dari hulu hingga hilir. Program ini akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai representasi dari negara hadir langsung dalam pembentukan ekosistem perunggasan yang baik. Konsep ini dibangun dengan pendekatan integrasi vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa seluruh simpul produksi, distribusi, dan pengolahan berada dalam satu kesatuan ekosistem yang efisien, terukur, dan mampu menghasilkan output yang berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan besar dalam industri perunggasan nasional, mulai dari ketergantungan bahan baku impor, fluktuasi harga, ketidakseimbangan pasokan, hingga kualitas infrastruktur yang belum merata.

Telur dan daging ayam merupakan sumber utama protein hewani masyarakat serta komoditas strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Pada tahun 2024, produksi nasional telur dan daging ayam secara agregat berada dalam kondisi surplus, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan pasokan dan harga antarwilayah. Disparitas produksi dan distribusi masih terjadi, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yang berdampak pada fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) memerlukan tambahan pasokan telur dan daging ayam dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, kedua komoditas tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah, sementara angka stunting nasional masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan industri hulu dan hilir secara merata dan berkelanjutan.

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan produksi telur dan daging ayam di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung swasembada pangan nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian protein hewani di tingkat provinsi dan pulau melalui konsep “Setiap Pulau Mandiri Protein”, sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan daerah.

Selain itu, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak melalui penguatan industri hulu dan hilir, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting nasional.

2. Arah Kebijakan

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi diarahkan melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk saat ini PTPN III dan PT Berdikari yang dipercaya sebagai pelaksana, sebagai penggerak utama pembangunan industri perunggasan terintegrasi. Pendanaan bersumber dari BPI Danantara sebesar Rp. 20 triliun yang dikelola BUMN membangun industri dan ekosistem hulu-hilir untuk memastikan kesinambungan produksi dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan bibit, pakan, pemotongan, penyimpanan, dan pengolahan produk.

Kebijakan ini akan didukung oleh penyediaan pembiayaan yang terjangkau melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan dengan bunga sebesar 3 persen, yang dipersiapkan untuk peternak rakyat yang akan menjadi mitra budidaya. Pengembangan fasilitas industri perunggasan dilakukan secara terintegrasi dan difokuskan pada pemerataan wilayah, terutama di 29 provinsi di luar Pulau Jawa dan Jawa Timur. Selain itu, dukungan input strategis diperkuat melalui produksi Grand Parent Stock (GPS) oleh BUMN dan penyediaan vaksin serta obat hewan oleh BBVF Pusvetma.

3. Output Kebijakan

Implementasi kebijakan ini diarahkan pada pembangunan 323 unit fasilitas industri perunggasan hulu dan hilir yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut mencakup pabrik pakan, kandang GPS, Parent Stock (PS), dan pullet, rumah potong unggas dan cold storage, pabrik olahan daging ayam dan telur, serta fasilitas produksi vaksin dan obat hewan.

Pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok perunggasan nasional, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjamin ketersediaan telur dan daging ayam secara berkelanjutan di daerah. Dengan demikian, nilai tambah industri perunggasan dapat dinikmati secara lebih merata oleh peternak dan pelaku usaha di daerah.

4. Dampak yang Diharapkan

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1,46 juta orang serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga mencapai Rp81,5 triliun per tahun. Dampak lanjutan dari peningkatan aktivitas ekonomi ini adalah penurunan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan sentra produksi perunggasan.

Di sisi konsumsi, kebijakan ini diharapkan meningkatkan konsumsi telur dari 21,8 kg menjadi 24,6 kg per kapita per tahun serta konsumsi daging ayam dari 13,6 kg menjadi 17,6 kg per kapita per tahun. Peningkatan konsumsi protein hewani tersebut diharapkan berkontribusi langsung terhadap perbaikan status gizi masyarakat dan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

5. Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi perlu ditetapkan sebagai program prioritas nasional dan didukung oleh percepatan realisasi investasi serta penyaluran KUR khusus peternakan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi produksi dan stabilitas harga agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Integrasi kebijakan hilirisasi ayam terintegrasi dengan program penurunan stunting dan pengendalian inflasi pangan perlu terus diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

6. Perkembangan Pelaksanaan

- a. Pada tanggal 13 November 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menyampaikan surat permintaan penyusunan dokumen *Pra-Feasibility Study* (Pra-FS) Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi kepada PTPN III (Persero).
- b. Tindak lanjut dari permintaan tersebut dilakukan melalui kegiatan *workshop* penyusunan Pra-FS pada tanggal 17 November 2025 yang diselenggarakan oleh PTPN III, dengan fokus pada *brainstorming* pengembangan ekosistem perunggasan nasional di lingkungan PTPN Group.
- c. Pada tanggal 17 November 2025 telah disampaikan surat usulan skema kredit dengan bunga 3 persen kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari dukungan pembiayaan program. Dalam rangka percepatan persiapan pelaksanaan program, pada tanggal 21–23 November 2025, dilakukan survei lokasi di 12 provinsi yang masuk dalam rencana pengembangan Tahap I.

Kegiatan survei ini dilaksanakan bersama PTPN Group, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi kesiapan lokasi dan potensi pengembangan.

- d. Dokumen *Pra-Feasibility Study* Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi kemudian diselesaikan dan diserahkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai konsultan pelaksana kepada Ditjen PKH Kementerian Pertanian pada tanggal 25 November 2025. Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2025, dokumen Pra-FS tersebut secara resmi disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi.
- e. Pelaksanaan hilirisasi ayam terintegrasi nantinya tidak dilaksanakan sendiri oleh PTPN III, oleh sebab itu pada tanggal 9 Desember 2025, dilaksanakan pertemuan sosialisasi konsep dan pola pelaksanaan hilirisasi ayam terintegrasi yang melibatkan BUMN Pangan, yaitu PTPN III dan PT Berdikari, bersama calon mitra potensial. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menjajaki skema kemitraan dalam pelaksanaan program pengembangan industri ayam terintegrasi.

Mendukung pelaksanaan program, telah terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1371/Kpts/OT.050/12/2025 pada tanggal 19 Desember 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Peningkatan Produksi Telur dan Daging Ayam melalui Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi. Pembentukan satuan tugas ini dimaksudkan untuk memastikan koordinasi, pengawalan, dan percepatan implementasi program di lapangan.

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian, sebagai bagian dari persiapan implementasi, perlu segera dilaksanakan *groundbreaking*. Untuk itu telah dilaksanakan survei lanjutan pada tanggal 18–20 Desember 2025 di empat provinsi prioritas *groundbreaking*, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya, menindaklanjuti arahan Bapak Menteri untuk dapat dilaksanakan *groundbreaking* diseluruh calon lokasi, pada periode 28–31 Desember 2025 dilakukan survei tambahan di delapan provinsi lainnya, meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Direncanakan pada akhir bulan Januari 2026 atau awal bulan Februari 2025 akan dilaksanakan *groundbreaking* Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahap I di 12 provinsi. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya implementasi fisik program secara nasional sebagai upaya penguatan industri perunggasan terintegrasi dan pemerataan produksi telur serta daging ayam di seluruh wilayah Indonesia.

Secara paralel saat ini sedang disusun *Feasibility Study* (FS) pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi oleh BPI Danantara. Dokumen ini diperlukan sebagai dasar kebijakan untuk memastikan kesiapan teknis, ekonomi, dan kelembagaan sebelum program diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah.

3. Pengembangan Ayam Petelur

Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan, kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dalam rangka mendukung program pangan merah putih mendukung program makan bergizi gratis dan meningkatkan populasi dan produksi ternak ayam petelur.

Fasilitasi pengembangan ayam petelur bertujuan untuk mewujudkan kemandirian produksi pangan asal ternak di setiap desa yang dilakukan melalui introduksi skema klasterisasi peternakan di masing-masing desa dengan pemanfaatan pekarangan rumah tangga yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan protein hewani rumah tangga sekaligus dapat berkontribusi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku dan Maluku Utara dengan fasilitasi bantuan berupa bantuan ayam petelur umur 16 (enam belas) minggu sebanyak 600 (enam ratus) ekor per kelompok, bantuan pakan selama 3 (tiga) bulan, paket kandang beserta tempat pakan dan minum, obat dan vitamin untuk kebutuhan 6 (enam) bulan, operasional pendampingan satker.

Target Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025 sebanyak 493.800 ekor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.164,335 miliar. Perkembangan pelaksanaan kegiatan: i) usulan kelompok yang masuk sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 493.800 ekor (823 kelompok) atau 100% dari target 493.800 ekor (823 kelompok); ii) kelompok yang telah di verifikasi sebanyak 823 kelompok (493.800 ekor atau 100%); iii) sebanyak 18 satker pelaksana telah melakukan penandatanganan kontrak ayam sebanyak 823 kelompok (493.800 ekor atau 100%); iv) telah dilakukan distribusi bantuan oleh 18 (empat belas) satker pelaksana sebanyak 823 kelompok (493.800 ekor atau 100,00%).



Gambar 9. Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025

4. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku

Penyakit Mulut dan Kuku adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. Penyakit Mulut dan Kuku dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya.

Perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan konfirmasi kejadian di lapangan, hasil pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku sebagai dasar untuk menentukan strategi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan melalui vaksinasi, biosekuriti, pengobatan dan/atau peningkatan kesadaran masyarakat.

Program penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada basis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat,

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku melalui KIE, melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas ternak dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas antar daerah dengan melibatkan instansi terkait.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan distribusi vaksinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku sebanyak 4.000.000 dosis atau 100% dari target tahun 2025 sebanyak 4.000.000 dosis. Realisasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku yang difasilitasi APBN PKH pada tahun 2025 sebanyak 3.670.066 dosis, APBD sebanyak 542.546 dosis, Mandiri sebanyak 204.904 dosis dan CSR sebanyak 19.873 dosis. Lokasi vaksinasi telah dilaksanakan di 29 provinsi, 402 kabupaten/kota, 4.005 kecamatan dan 18.337 desa.



Gambar 10. Realisasi Vaksinasi PMK Tahun 2025

B. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Kinerja Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, penyerapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp1.216.548.447.400,00 atau setara dengan 95,92% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp1.268.284.347.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp1.260.044.394.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96,55%.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: i) Kantor Pusat sebesar Rp180,31 miliar atau 95,66% dari pagu anggaran Rp188,50 miliar; ii) Kantor Daerah/UPT sebesar Rp1,01 triliun atau 96,16% dari pagu anggaran Rp1,05 triliun; dan iii) Tugas Pembantuan (Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi) sebesar Rp25,30 miliar atau 88,71% dari pagu anggaran Rp28,52 miliar.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Kewenangan

Jenis Kewenangan	Pagu	Blokir	Pagu Tanpa Blokir	Realisasi SP2D	%SP2D	% SP2D Tanpa Blokir
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	7=5/4
Kantor Pusat	188.498.269.000	4.167.691.000	184.330.578.000	180.308.049.873	95,66	97,82
Kantor Daerah/UPT	1.051.265.439.000	1.581.504.000	1.049.683.935.000	1.010.939.530.743	96,16	96,31
Tugas Pembantuan	28.520.639.000	2.490.758.000	26.029.881.000	25.300.866.784	88,71	97,20
Jumlah	1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000	1.216.548.447.400	95,92	96,55

Sumber: OMSPAN, 2026

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu: i) Belanja Pegawai sebesar Rp155,31 miliar atau 99,32% dari pagu anggaran Rp156,39 miliar; ii) Belanja Barang sebesar Rp780,78 miliar atau 95,15% dari pagu anggaran Rp820,56 miliar; dan iii) Belanja Modal sebesar Rp280,45 miliar atau 96,26% dari pagu Rp291,34 miliar.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Pagu Tanpa Blokir	Realisasi SP2D	%SP2D	% SP2D Tanpa Blokir
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	7=5/4
Pegawai	156.393.232.000	-	156.393.232.000	155.324.278.505	99,32	99,32
Barang	820.555.628.000	8.239.953.000	812.315.675.000	780.778.971.355	95,15	96,12
Modal	291.335.487.000	-	291.335.487.000	280.445.197.540	96,26	96,26
Total	1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000	1.216.548.447.400	95,92	96,55

Sumber: OMSPAN, 2026

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan utama yaitu (a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp55,18 miliar atau 99,94% dari pagu anggaran Rp55,21

miliar; (b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp303,2 miliar atau 98,31% dari pagu anggaran Rp308,4 miliar; (c) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp191,2 miliar atau 97,96% dari pagu Rp195,18 miliar; (d) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp4,17 miliar atau 98,29% dari pagu Rp4,24 miliar; (e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp4,17 miliar atau 98,29% dari pagu Rp4,24 miliar; dan (f) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak sebesar Rp24,15 miliar atau 72,17% dari pagu Rp33,47 miliar.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2025 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan Utama	Pagu	Blokir	Pagu Tanpa Blokir	Realisasi SP2D	%SP2D	% SP2D Tanpa Blokir
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	7=5/4
Peningkatan Produksi Pakan Ternak	6.693.683.000	-	6.693.683.000	6.678.502.247	99,77	99,77
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	347.794.799.000	-	347.794.799.000	339.265.321.792	97,55	97,55
Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	407.021.180.000	165.539.000	406.855.641.000	381.765.856.470	93,80	93,83
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.585.405.000	-	23.585.405.000	23.202.401.689	98,38	98,38
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	478.689.280.000	8.074.414.000	470.614.866.000	461.139.014.832	96,33	97,99
Hilirisasi Hasil Peternakan	4.500.000.000	-	4.500.000.000	4.497.350.370	99,94	99,94
Total	1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000	1.216.548.447.400	95,92	96,55

Sumber: OMSPAN, 2025

2. Kinerja Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan dengan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan dilakukan di Direktorat Pakan. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 kegiatan atau 100% dari target.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pakan terealisasi sebanyak 4 NSPK atau 100% dari target. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebagai berikut:

- Penyusunan Regulatory Impact Assesment (RIA) Usulan Impor Komoditas Gandum menjadi Komoditas Larangan Terbatas (Lartas).
- Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Sektor Benih Tanaman Pakan Ternak dan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak).

- c. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Cara Pemberian Pakan yang Baik pada Sapi Potong Sistem Pemeliharaan Intensif.
- d. Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Cara Pembuatan Pakan yang Baik/CPPB dan Pendaftaran Pakan).

3. Mutu dan Keamanan Pakan

Dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan, maka dilakukan Kegiatan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan di BPMSB Bekasi dengan capaian output kegiatan sebesar 3.887 produk (100%) dari target 3.887 produk.

Capaian Kinerja Kegiatan Pakan Ternak Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 1.

3. Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dengan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan dilakukan di Direktorat Kesehatan Hewan. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 6 kegiatan atau 100% dari target.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kesehatan Hewan terealisasi sebanyak 3 NSPK atau 100% dari target. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pelarangan dan Pembatasan Penggunaan Antimikroba Golongan *Fluoroquinolon* dan *Cephalosporin* Generasi 3 dan 4.
- c. Revisi Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik.

3. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

Penyidikan dan pengujian penyakit dilaksanakan melalui kegiatan surveilans aktif yang dilaksanakan oleh UPT Veteriner yaitu Balai Besar Veteriner (BBV), Balai Besar Veteriner Farma (BBVF), Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH), Balai Veteriner (BV) serta UPT Perbibitan dan Pakan Ternak yaitu Balai Besar Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

(BBPTUHPT), Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT), Balai Besar Inseminasi Buatan (BIB), dan Balai Embrio ternak (BET). Target dan Realisasi Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2025 (per 7 Januari 2026)

No	UPT	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBV Wates	9.104	9.104	100,00	9.293.845.000	9.281.662.244	99,87
2	BBV Maros	7.500	7.500	100,00	5.296.218.000	5.293.677.332	99,95
3	BBV Denpasar	6.588	6.588	100,00	7.776.249.000	7.741.020.434	99,55
4	BBVF Pusvetma	1.400	1.680	120,00	570.932.000	570.922.797	100,00
5	BBPMSOH Gunungsindur	700	752	107,43	784.091.000	766.506.401	97,76
6	BV Medan	5.241	5.241	100,00	3.657.478.000	3.642.106.503	99,58
7	BV Bukittinggi	6.500	6.500	100,00	4.010.226.000	3.945.375.885	98,38
8	BV Lampung	5.473	5.473	100,00	4.560.560.000	4.540.807.415	99,57
9	BV Subang	7.710	7.710	100,00	4.758.680.000	4.452.130.320	93,56
10	BV Banjarbaru	5.360	5.360	100,00	3.483.489.000	3.483.390.734	100,00
11	BV Jayapura	1.855	1.855	100,00	990.725.000	924.796.411	93,35
12	BBPTUHPT Baturraden	1.582	1.582	100,00	745.122.000	745.117.600	100,00
13	BBIB Singosari	310	310	100,00	136.854.000	129.347.960	94,52
14	BPTUHPT Indrapuri	900	900	100,00	425.562.000	425.520.079	99,99
15	BPTUHPT Siborongborong	401	401	100,00	188.871.000	187.447.575	99,25
16	BPTUHPT Padang Mangatas	1.230	1.230	100,00	425.612.000	425.545.050	99,98
17	BPTUHPT Sembawa	1.250	1.500	120,00	332.647.000	332.579.000	99,98
18	BIB Lembang	223	223	100,00	105.033.000	105.013.446	99,98
19	BET Cipelang	620	622	100,32	286.546.000	286.396.156	99,95
21	BPTUHPT Pelabuhan	1.345	1.345	100,00	633.495.000	631.558.452	99,69
22	BPTUHPT Denpasar	1.880	1.880	100,00	876.963.000	872.257.000	99,46
	Total	67.172	67.756	100,87	49.339.198.000	48.783.178.794	98,87

4. Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease*

Pengendalian dan penanggulangan *Lumpy Skin Disease* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan sistem produksi peternakan nasional, mengingat dampak *Lumpy Skin Disease* yang signifikan terhadap kesehatan ternak, produktivitas, dan keberlanjutan usaha peternakan, khususnya pada sapi perah dan sapi potong. Oleh karena itu, strategi pengendalian *Lumpy Skin Disease* dirancang untuk menurunkan kejadian penyakit secara progresif di wilayah

tertular sekaligus mempertahankan wilayah yang telah bebas *Lumpy Skin Disease* secara berkelanjutan. Pengendalian *Lumpy Skin Disease* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis zonasi dan risiko, dengan mempertimbangkan tingkat kejadian penyakit, kepadatan populasi ternak, serta pola pergerakan ternak antarwilayah.

Jumlah ternak yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 8.977 ekor, yang terdiri atas sapi sebanyak 8.639 ekor, kerbau 313 ekor, domba 14 ekor, dan kambing 9 ekor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi LSD pada tahun 2025 masih difokuskan pada ternak sapi sebagai komoditas utama yang paling rentan dan memiliki dampak ekonomi signifikan. Realisasi vaksinasi *Lumpy Skin Disease* Tahun 2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Vaksinasi *Lumpy Skin Disease* Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak (Ekor)				
	Domba	Kambing	Kerbau	Sapi	Jumlah
DI Yogyakarta		5			5
Gorontalo				6	6
Jawa Barat			313		313
Jawa Tengah	8	3		45	56
Jawa Timur	1	1		2.253	2.255
Kalimantan Timur				207	207
Lampung				2.991	2.992
Riau				2	2
Sulawesi Selatan				1	2
Sulawesi Tengah				1	1
Sumatera Barat				49	49
Sumatera Selatan				5	5
Sumatera Utara	5			3.079	3.084
Jumlah	14	9	313	8.639	8.977

5. Pengendalian Penyakit *African Swine Fever*

Pengendalian dan penanggulangan *African Swine Fever* merupakan prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan hewan nasional, mengingat penyakit ini bersifat sangat menular, menimbulkan tingkat kematian yang tinggi pada babi, serta berdampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha peternakan babi, perekonomian masyarakat, dan stabilitas pangan di wilayah terdampak.

Realisasi vaksinasi *African Swine Fever* tahun 2025 sebanyak 498 ekor ternak babi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi *African Swine Fever* masih terfokus pada wilayah tertentu sesuai dengan tingkat risiko, kondisi epidemiologi, serta kesiapan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi. Fokus vaksinasi pada satu provinsi mencerminkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mempertimbangkan

situasi penyakit, kapasitas layanan kesehatan hewan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

6. Pengendalian Penyakit *Rabies*

Pengendalian dan penanggulangan *rabies* dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat *rabies* merupakan penyakit zoonosis yang bersifat fatal dan berdampak langsung terhadap keselamatan manusia. Pengendalian *rabies* dilaksanakan melalui strategi JAWARA (Jawa Bebas *Rabies* 2029), dengan fokus pada percepatan eliminasi *rabies* di Pulau Jawa sekaligus memperkuat pencegahan di wilayah lain.

Jumlah hewan yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 25.015 ekor yang tersebar di 15 provinsi. Vaksinasi didominasi oleh anjing sebanyak 14.095 ekor (56,3%) dan kucing sebanyak 10.809 ekor (43,2%), sementara sisanya merupakan vaksinasi pada hewan lain seperti primata, sapi, linsang, domba, kambing, kerbau, serta kucing ras *British Short Hair* dalam jumlah terbatas. Realisasi vaksinasi *rabies* Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Vaksinasi *Rabies* Tahun 2025

Provinsi	Jenis Hewan									Grand Total
	Anjing	British Short Hair	domba	kambing	kerbau	Kucing	linsang	Primate	sapi	
Aceh	266					63				329
Banten	299									299
Jambi	743					796		1		1.540
Jawa Barat	2		3			45			2	52
Jawa Tengah	31					301		1	2	335
Jawa Timur	8					254	3	1		266
Kalimantan Timur	914	1				1.241		6		2.162
Lampung	800	6		1		2.792		39		3.638
Nusa Tenggara Barat	6.119				1	1.370		6	3	7.499
Riau	407					622		3		1.032
Sulawesi Selatan	1.811					1.757			7	3.575
Sulawesi Tenggara	406					349		1	1	757
Sumatera Barat	549					831		6	2	1.388
Sumatera Selatan	1.129					371		11	2	1.513
Sumatera Utara	611					17		1	1	630
Grand Total	14.095	7	3	1	1	10.809	3	76	20	25.015

7. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza*

Pengendalian dan penanggulangan *High Pathogenic Avian Influenza*/HPAI merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat HPAI bersifat sangat menular, menyebabkan tingkat kematian tinggi pada unggas, serta berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan risiko zoonosis. Oleh karena itu, strategi pengendalian HPAI dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit, melindungi sistem produksi unggas nasional, serta menjaga keamanan pangan asal hewan.

8. Pengendalian *Brucellosis*

Pengendalian dan penanggulangan *Brucellosis* merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan hewan nasional, mengingat penyakit ini bersifat zoonosis, berdampak langsung terhadap produktivitas ternak sapi, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian *Brucellosis* dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk

melindungi unit usaha peternakan, mempertahankan wilayah bebas penyakit, serta mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Realisasi vaksinasi *Brucellosis* Tahun 2025 sebanyak 159 ekor di Provinsi Jawa Timur. Vaksinasi tersebut terdiri atas 158 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Pelaksanaan vaksinasi *Brucellosis* pada tahun 2025 masih bersifat terbatas dan terfokus pada wilayah tertentu, sesuai dengan hasil penilaian risiko dan kondisi epidemiologi penyakit di daerah.

9. Pengendalian Penyakit *Anthraks*

Pengendalian dan penanggulangan *anthraks* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat *anthraks* merupakan penyakit zoonosis strategis yang bersifat fatal, berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, serta dapat berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengendalian Anthraks dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan risiko kejadian penyakit serta melindungi masyarakat dan populasi ternak.

Realisasi vaksinasi *anthraks* tahun 2025 sebanyak 4.002 ekor, yang terdiri atas domba 51 ekor, kambing 302 ekor, kerbau 411 ekor, dan sapi 4.002 ekor. Realisasi vaksinasi tersebut tersebar di lima provinsi. Kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total vaksinasi mencapai 3.775 ekor, yang didominasi oleh sapi sebanyak 3.364 ekor dan kerbau 411 ekor. Tingginya capaian di provinsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi *Anthraks* pada wilayah dengan populasi ternak besar dan riwayat kerawanan penyakit. Realisasi Vaksinasi *Anthraks* Tahun 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Vaksinasi *Anthraks* Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak (Ekor)			
	Domba	Kambing	Kerbau	Sapi
Di Yogyakarta	51	302		
Dki Jakarta				1
Jawa Tengah				1
Nusa Tenggara Barat			411	3.364
Sulawesi Selatan				636
Jumlah	51	302	411	4.002

10. Pengendalian Penyakit *Clasical Swine Fever*

Pengendalian dan penanggulangan *Clasical Swine Fever* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan babi nasional. *Clasical Swine Fever* bersifat sangat menular, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, serta berpotensi mengganggu stabilitas produksi dan distribusi komoditas ternak babi. Oleh karena itu, strategi pengendalian *Clasical Swine Fever* dirancang secara komprehensif, terintegrasi,

dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit serta mempertahankan wilayah bebas *Classical Swine Fever*.

11. Pengendalian Penyakit *Septicaemia Epizootica*

Pengendalian dan penanggulangan *Septicaemia Epizootica* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, khususnya pada ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. *Septicaemia Epizootica* bersifat akut, dapat menyebabkan kematian cepat, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Oleh karena itu, strategi pengendalian *Septicaemia Epizootica* dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit serta melindungi populasi ternak di wilayah berisiko.

Realisasi vaksinasi *Septicaemia Epizootica* Tahun 2025 sebanyak 10.082 ekor, yang terdiri atas 1.847 ekor kerbau dan 8.235 ekor sapi. Pelaksanaan vaksinasi tersebar di sembilan provinsi. Realisasi vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total 8.398 ekor ternak, yang didominasi oleh 7.280 ekor sapi dan 1.118 ekor kerbau. Realisasi Vaksinasi *Septicaemia Epizootica* Tahun 2025 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Vaksinasi *Septicaemia Epizootica* Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak	
	Kerbau	Sapi
Bali	195	
Banten		123
Dki Jakarta		7
Jambi	534	303
Jawa Tengah		13
Kalimantan Timur		99
Lampung		409
Nusa Tenggara Barat	1.118	7.280
Sumatera Barat		1
Jumlah	1.847	8.235

12. Pengendalian Penyakit Jembrana

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Jembrana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan pelestarian plasma nutfah ternak nasional, khususnya sapi Bali yang memiliki nilai strategis secara genetik, ekonomi, dan budaya. Penyakit Jembrana bersifat akut dengan tingkat kematian yang tinggi pada sapi Bali, sehingga memerlukan strategi pengendalian yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menekan risiko kejadian penyakit serta melindungi populasi ternak rentan.

Pengendalian Penyakit Jembrana dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan kekhususan spesies, mengingat penyakit ini terutama menyerang sapi Bali.

Realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025 sebanyak 9.453 ekor, yang terdiri atas 9.431 ekor sapi, 21 ekor babi, dan 1 ekor kerbau. Realisasi vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan capaian 4.494 ekor sapi, yang mencerminkan fokus pengendalian Jembrana pada wilayah dengan populasi sapi Bali yang signifikan. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan vaksinasi pada 2.009 ekor sapi, diikuti oleh Provinsi Riau sebanyak 1.548 ekor sapi, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan vaksinasi di wilayah pengembangan ternak sapi. Realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak		
	Babi	Kerbau	Sapi
Jambi			713
Kalimantan Timur			2.009
Riau			1.548
Sulawesi Selatan		1	647
Sulawesi Tenggara	21		4.494
Sumatera Barat			20
Jumlah	21	1	9.431

13. Pengendalian Penyakit *Surra*

Pengendalian dan penanggulangan *Surra* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, mengingat *Surra* merupakan penyakit hewan menular strategis yang menyerang berbagai jenis ternak, khususnya kuda, sapi, kerbau, dan unta, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Pengendalian *Surra* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan pengendalian vektor, mengingat penularan *Surra* sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kepadatan vektor serangga penghisap darah.

14. SBSN Sarana dan Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia

Kegiatan SBSN Balai Besar Veteriner Maros berupa Sarana dan Prasarana Pembangunan *Biosecurity Center*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72 miliar dan realisasi anggaran sebesar Rp.68,889 miliar,- atau 95,68%.

Komponen Kegiatan Sarana SBSN berupa pengadaan 37 jenis alat dan mebeler penunjang laboratorium dengan pagu anggaran sebesar Rp.16,466 miliar dan Kegiatan Prasarana SBSN berupa pembangunan 13 item bangunan (bangunan gedung dan sarana penunjang) dengan pagu anggaran sebesar Rp.55,533 miliar.

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dilaksanakan selama 180 hari kalender proses penandatanganan kontrak pada tanggal 3 Juli 2025 dan perkiraan serah terima barang pada tanggal 31 Desember 2025.

15. SBSN Sarana dan Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah

Kegiatan SBSN di Balai Veteriner Bukittinggi berupa Sarana dan Prasarana Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan, Zoonosis dan Pengujian Produk Hewan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53,5 miliar. Komponen Kegiatan Sarana SBSN berupa pengadaan alat laboratorium dan alat penunjang lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.17,661 miliar dan Kegiatan Prasarana SBSN berupa pembangunan gedung dengan pagu anggaran sebesar Rp.35,838 miliar dan realisasi anggaran sebesar Rp.50,246 miliar atau 93,92%.

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan, Zoonosis dan Pengujian Produk Hewan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah dilaksanakan selama 150 hari kalender proses penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Juli 2025 dan perkiraan serah terima barang pada tanggal 18 Desember 2025.

Prasarana Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah: a) Pembangunan Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Pembangunan Gedung Laboratorium Veteriner Terpadu, Pembangunan Gedung Pelayanan Veteriner, Pembangunan Instalasi Hewan Percobaan, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pembangunan Gedung Garasi dan prasarana pendukung); b) Perencanaan Teknis Konstruksi SBSN; c) Manajemen Konstruksi SBSN; d) Perizinan Gedung dan Bangunan; e) Operasional Prasarana SBSN.

Capaian Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2.

4. Kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan budi daya ternak dengan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak dilakukan di Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 6 kegiatan atau 100% dari target.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak terealisasi sebanyak 5 NSPK atau 100% dari target. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebagai berikut:

a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

- 1) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Ayam Murung Panggang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Domba Rote dari Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT.
- 3) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan dari Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
- 4) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Itik Pengging Soloan dari Jawa Tengah.
- 5) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron dari Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Kapas Sembawa dari BPTU-HPT Sembawa.
- 7) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Golden Sembawa dari BPTU-HPT Sembawa.
- 8) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Alope Unhas 1 dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.
- 9) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumpun sapi Gama dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada.
- 10) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing British Alpine.
- 11) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing Toggenburg.
- 12) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing Anglo Nubian.
- 13) Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan.

b. Bidang Pengawasan, Penerapan Mutu dan Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak

- 1) Rancangan Standar Nasional Indonesia *Final Stock* Petelur.
- 2) Rancangan Standar Nasional Indonesia Pelayanan Inseminasi Buatan pada Sapi.
- 3) Rancangan Standar Nasional Indonesia Sapi Pasundan.

c. Bidang Ruminansia Perah

Draft Peraturan Menteri Pertanian *Good Breeding Practices/Good Farming Practices* Sapi Perah.

d. Bidang Ruminansia Potong

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perkawinan Ternak.

e. Bidang Unggas dan Aneka Ternak

1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025.

2) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025.

3. Bantuan Ternak Ruminansia Potong

Pengalokasian kegiatan bantuan ternak ruminansia potong tahun 2025 untuk kambing/domba sebanyak 1.000 ekor. Realisasi kegiatan sebanyak 1.000 ekor atau terealisasi 100%. Pengadaan ternak dilaksanakan oleh 3 Satker Pusat yaitu BBPTUHPT Baturraden sebanyak 400 ekor, BPTUHPT Pelaihari sebanyak 300 ekor, dan BPTUHPT Sembawa sebanyak 300 ekor.

4. Bantuan Ternak Lainnya

Pengalokasian kegiatan bantuan ternak lainnya tahun 2025 untuk babi sebanyak 100 ekor. Realisasi kegiatan sebanyak 100 ekor atau terealisasi 100%. Pengadaan ternak dilaksanakan oleh 2 Satker Pusat yaitu BPTUHPT Denpasar sebanyak 50 ekor dan BVet Jayapura sebanyak 50 ekor.

5. Bantuan Ternak Unggas

Pengalokasian kegiatan bantuan ternak unggas/ayam lokal terealisasi sebesar 496.300 ekor (100%) dengan target tahun 2025 sebanyak 496.300 ekor. Kegiatan Bantuan Ternak Unggas dilaksanakan oleh 19 satker (BBPTUHPT Baturraden, BBVet Maros, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBPMSOH, BPTUHPT Denpasar, BVet Lampung, BET Cipelang, BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Padang Mangatas, BPTUHPT Sembawa, BPTUHPT Pelaihari, BVet Subang, BPMSPH, BPMSP, BVet Jayapura, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Selatan)

6. Benih/Bibit Ternak Unggul

Target benih ternak unggul tahun 2025 sebesar 6.400.800 produk dengan realisasi sebesar 6.263.500 produk (97,85%), sedangkan realisasi bibit ternak unggul sebesar 1.102.372 produk atau 61,58% dari target tahun 2025 sebesar 1.790.184 produk.

7. Sarana dan Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Penyediaan sarana perbibitan dan produksi ternak berupa kontainer yang dimanfaatkan untuk distribusi semen beku dan nitrogen cair. Realisasi kegiatan sebanyak 19 unit atau terealisasi 100%.

8. SBSN Sarana dan Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari

Kegiatan SBSN di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari berupa Sarana dan Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107,342 miliar. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.103,423 miliar atau 96,35%.

Komponen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari meliputi a) Gedung Utama Pusat Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.38,845 miliar; b) Laboratorium Modern Inseminasi Buatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.12,577 miliar; c) Stasiun Inseminasi Buatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21,298 miliar; d) Sarana SBSN dengan pagu anggaran sebesar Rp.26,018 miliar; e) Prasarana Pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.6,309 miliar; dan f) Sumur Bor dengan pagu anggaran sebesar Rp.2,293 miliar.

Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 3.

5. Kinerja Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dengan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dilakukan di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 kegiatan atau 100% dari target.

Kegiatan yang dilaksanakan: a) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Higiene, Sanitasi dan Penerapan; b) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi; c) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; d) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Zoonosis; dan e) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Hewan.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner terealisasi sebanyak 5 NSPK atau 100% dari target. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9996/KPTS/HK.160/F/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Audit dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner.
 - c. Standard Operasional Prosedur Penanganan Bahan Baku Pangan Asal Hewan MBG.
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.
 - e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis dan Kriteria Hewan Potong serta Persyaratan Cara yang Baik dan Pengawasan di Rumah Potong Hewan.
3. Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 58 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Realisasi Kegiatan Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan tahun 2025 sebanyak 45.514 produk atau 110% dari target tahun 2025 sebanyak 37.915 produk, dengan rincian kegiatan berupa pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan di 10 Satker UPT.

Tabel 16. Realisasi Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan Tahun 2025

UPT	REALISASI			
	PMSRCM & PENGAWASAN (SAMPEL AKTIF)	SURVEILANS AMR	LAYANAN PENGUJIAN (SAMPEL PASIF)	TOTAL
Balai Besar Veteriner Wates	3.863	55	4.605	8.523
Balai Besar Veteriner Maros	904	55	2.160	3.119
Balai Besar Veteriner Denpasar	1.069	55	3.950	5.074
Balai Veteriner Medan	2.423	55	475	2.953
Balai Veteriner Bukittinggi	746	55	2.680	3.481

Balai Veteriner Lampung	1.551	55	1.510	3.116
Balai Veteriner Banjarbaru	599	40	1.495	2.134
Balai Veteriner Subang	1.748	55	397	2.200
Balai Veteriner Jayapura	245	0	137	382
BPMSPH Bogor	1.636	500	12.396	14.532
Total	14.784	925	29.805	45.514

4. Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat yang mengkonsumsi produk hewan, pelaksanaan pengujian keamanan produk hewan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pengujian keamanan produk hewan, telah dialokasikan anggaran untuk fasilitasi sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi sarana dan prasarana kesmavet sebanyak 28 unit atau terealisasi 100% dari target.

Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 4.

6. Kinerja Hilirisasi Hasil Peternakan

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan dengan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Hilirisasi Hasil Peternakan

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Hilirisasi Hasil Peternakan dilakukan di Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 4 kegiatan atau 100% dari target.

Kegiatan yang dilaksanakan: a) Pembinaan dan Pendampingan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan; b) Pembinaan dan Pendampingan Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan; c) Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak; dan d) Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan Usaha Peternakan.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Hilirisasi Hasil Peternakan terealisasi sebanyak 3 NSPK atau 100% dari target. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Pendampingan Penerapan dan Pengawasan Mutu telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12358/KPTS/PK.030/F/11/2025.
- b. Petunjuk Teknis tentang Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0985/KPTS/PP.040/F/10/2025.
- c. Petunjuk Teknis Pengembangan Pasar Ternak telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12945/KPTS/HK.160/F/12/2025.

3. Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor

Komponen Kegiatan meliputi Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak, Pendampingan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging, dan Pendampingan Hilirisasi Hasil Peternakan. Realisasi Kegiatan sebanyak 278 Lembaga atau 100% dari target.

a. Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga sekarang dan telah tersedia 6 (enam) buah armada kapal Camara Nusantara.

Kerjasama tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di bidang pertanian Nomor: 03/MoU/HK.220/M/03/2024 dan Nomor: PJ-MHB 3 Tahun 2024.

Ditjen PKH menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKH dengan Ditjen Perhubungan Laut tentang pemanfaatan kapal laut Nomor: 27104/HK.220/F/11/2025 dan Nomor: HK.201/12/2/DJPL/2025.

Daerah yang menjadi pangkalan trayek kapal khusus angkutan ternak adalah Provinsi NTT, NTB dan Gorontalo, sementara daerah penerima ternak yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kapal Camara Nusantara mengangkut ternak sapi dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Sejak awal beroperasi tahun 2015 hingga tahun 2025, kapal khusus angkutan ternak telah mengangkut ternak

sebanyak 344.891 ekor dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025 disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025

Tahun 2017 jumlah muatan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena adanya proses *docking* armada kapal Camara Nusantara, kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Penurunan muatan terjadi pada tahun 2023 dikarenakan merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku, sehingga lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen terbatas, untuk mengurangi penyebaran penyakit. Pemerintah Provinsi NTT menjadi lebih hati-hati dikarenakan NTT merupakan satu-satunya provinsi yang bebas dari penyakit PMK. Tahun 2024-2025 terjadi kenaikan kembali dikarenakan kasus PMK sudah mulai melandai dan lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen sudah kembali normal.

b. Pendampingan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging

Pendampingan investasi sapi perah dan sapi pedaging ditargetkan dilakukan terhadap 274 pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan antara lain pendampingan pemanfaatan lahan, pendampingan perizinan, dan pendampingan pembiayaan.

1) Pendampingan Pemanfaatan Lahan

Pendampingan pemanfaatan lahan dilakukan kepada investor yang berkomitmen untuk berinvestasi sapi dengan pola integrasi. Lahan yang dapat digunakan sebagai lahan investasi usaha sapi lahan di bawah kewenangan Badan Bank Tanah, Kementerian Kehutanan, PT. Berdikari, dan Pemerintah Daerah. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi lahan calon lokasi investasi, serta melakukan koordinasi

dan diskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait mekanisme pemanfaatan dan dukungan lahan investasi.

2) Pendampingan Perizinan

Perizinan lingkungan dan kesesuaian tata ruang merupakan syarat perizinan dasar bagi pelaku usaha sebelum memulai kegiatan budidaya ternak. Pendampingan perizinan yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi informasi perizinan, pendampingan perizinan lingkungan dan tata ruang.

3) Pendampingan Akses Pembiayaan

Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dan investor baru di bidang peternakan adalah keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dilakukan fasilitasi pembiayaan yang tidak hanya memberikan kemudahan akses kredit, tetapi juga pendampingan teknis dan kelembagaan agar investasi dapat berjalan berkelanjutan dan produktif.

Fasilitasi pendampingan akses pembiayaan yang telah dilakukan sosialisasi pembiayaan untuk peternakan sapi dari perbankan, koordinasi terkait pembiayaan alternatif dari lembaga pemerintah non perbankan, audiensi calon investor dengan pihak perbankan terkait kendala akses pembiayaan, pengajuan pembiayaan ternak sapi dengan skema khusus kepada Kemenko Perekonomian.

c. Pendampingan Hilirisasi Hasil Peternakan

Pendampingan hilirisasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil peternakan melalui pembinaan dan pendampingan pascapanen dan pengolahan susu di Kelompok Peternak/Koperasi Sapi Perah dan di Unit Pengolahan Hasil Susu (UPH).

Pembinaan dan pendampingan pada unit pengolahan susu dilakukan untuk mengatasi tantangan UPH susu khususnya skala mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta cara produksi pangan olahan yang baik untuk pengajuan sertifikat NKV, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, izin edar MD dan halal.

Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha unit pengolahan hasil susu dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, rendahnya kesadaran akan pentingnya standar mutu dan keamanan pangan, keterbatasan sarana dan prasarana produksi yang memenuhi standar, serta belum optimalnya sistem dokumentasi dan pencatatan proses produksi.

Selain itu, pelaku usaha skala kecil umumnya belum memiliki pendampingan teknis yang berkelanjutan dalam melakukan perbaikan fasilitas, penerapan

prosedur operasional standar, serta pemenuhan persyaratan administrasi perizinan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengajuan sertifikasi dan perizinan sering mengalami kendala dan memerlukan waktu yang panjang.

Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan ini, diharapkan unit pengolahan susu skala kecil mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik secara konsisten, memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, serta mempercepat pemenuhan perizinan dan sertifikasi, sehingga produk susu yang dihasilkan aman, bermutu, dan berdaya saing di pasar.

Capaian Kinerja Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 5

7. Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan bantuan hukum lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Layanan dukungan manajemen internal sebagian besar bersifat administratif antara lain: Layanan Barang Milik Negara (BMN) merupakan kegiatan penatausahaan BMN berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Layanan Hukum merupakan kegiatan layanan administrasi penyusunan produk hukum seperti Surat Keputusan, Edaran, Peraturan-Peraturan dan lainnya; serta Layanan Umum merupakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang bersifat umum.

Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa layanan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kantor seperti alat pengolah data, alat komunikasi dan mebeulair perkantoran.

Layanan Manajemen Kinerja Internal merupakan kegiatan rutin kesekretariatan berupa perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, dan pemantauan dan evaluasi, baik pada satker pusat, kantor daerah maupun tugas pembantuan.

Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 6.

C. Penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Kementerian Pertanian kembali menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Ditjen PKH meraih Peringkat 1 dalam Kategori Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Penghargaan lain juga diraih oleh UPT lingkup Ditjen PKH, seperti peringkat 1 kategori Eselon II (BBVet Farma Surabaya), peringkat 2 kategori Eselon II (BBPTUHPT Baturraden), peringkat 7 kategori Eselon II (BBVet Denpasar), peringkat 8 kategori Eselon II (BBVet Wates), peringkat 1 kategori Eselon III (BPMSPH), peringkat ke 2 kategori Eselon III (BPTUHPT Sembawa).



Gambar 12. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

2. Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025

Beberapa Unit Pelaksana Teknis/UPT lingkup Ditjen PKH menerima penghargaan dengan kategori Pelayanan Prima pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian sebagai

bentuk apresiasi terhadap kinerja Unit Kerja dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. UPT yang meraih penghargaan Pelayanan Prima 2025 yaitu 1) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, 2) Balai Embrio Ternak Cipelang, 3) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, 4) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, 5) Balai Besar Veteriner Wates, dan 6) Balai Inseminasi Buatan Lembang.

UPT yang meraih penghargaan Praktik Baik Inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 yaitu 1) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, 2) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, dan 3) Balai Embrio Ternak Cipelang.



Gambar 13. Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025

3. **Cashless Award Kementerian Pertanian Kategori Eselon I**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meraih juara Harapan III *Cashless Award* Kategori Eselon I Tahun 2025 lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan ini merupakan apresiasi Menteri Pertanian kepada Eselon I yang melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran dengan melakukan optimalisasi penggunaan *Cash Management System* (CMS) untuk meminimalkan transaksi tunai Bendahara Pengeluaran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan



Gambar 14. Cashless Award Kementerian Pertanian Kategori Eselon I

Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation Category (SSTC) - FAO Global Technical Recognition 2025

Dalam ajang FAO Global Technical Recognition 2025 yang digelar oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari menerima penghargaan bergengsi sebagai *Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation* (SSTC) dalam kategori *South-South and Triangular Cooperation*. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi FAO terhadap kontribusi BBIB Singosari sebagai lembaga teknis yang berperan aktif dalam memperkuat kerja sama antarnegara berkembang melalui transfer teknologi, inovasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan.



Gambar 15. Penghargaan Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN



BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 disusun untuk memberikan informasi pencapaian Program/Kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Secara umum capaian Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2025 berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2025, penyerapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp1.216.548.447.400,00 atau setara dengan 95,92% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp1.268.284.347.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp1.260.044.394.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96,55%, sedangkan capaian output kegiatan pada rentang 61,58% sampai dengan 110%.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya: 1) Fragmentasi implementasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi regulasi antar Kementerian/Lembaga serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; 2) Manajemen anggaran dan program seperti *refocusing* program, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan efisiensi anggaran; 3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, baik dari segi kuantitas maupun pemerataan antar wilayah; 4) Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah secara *real time*; 5) Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata; 6) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan; 7) Kurangnya insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan skala kecil-menengah; 8) Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok; 9) Penurunan jumlah rumah tangga peternak; 10) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan *zoonosis* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 11) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya alih fungsi lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 12) Daya saing produk peternakan lokal masih rendah; 13) Persaingan global dan tekanan pasar produk asal hewan; dan 14) Dampak perubahan iklim.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Ditjen PKH telah melakukan upaya-upaya dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan non APBN. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mewujudkan swasembada pangan asal ternak, maka Ditjen PKH pada

tahun 2026 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ketersediaan dan kebutuhan (*supply-demand*) daging ayam ras dan telur ayam ras: (a). melakukan pengawalan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras serta telur konsumsi; (b). Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi; (c). Pengembangan ayam petelur (ayam merah putih).
2. Meningkatkan produksi daging dan susu: (a). Mendorong implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak (JPT) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi di lapangan, sehingga dapat meningkatkan produksi daging sapi, melalui penambahan angka kelahiran ternak; (b). mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional; (c). Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia; (d) Memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional (rancangan Inpres P2SDN).
3. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan harga yang diterima peternak dilakukan dengan mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak, baik untuk pengembangan sapi pedaging/sapi perah maupun juga untuk pengembangan ayam ras petelur dan pedaging.
4. Meningkatkan produksi kambing/domba dengan melakukan kerja sama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan dengan peternak, serta mendorong pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).
5. Meningkatkan *scaling up* usaha peternakan skala kecil-menengah melalui kemudahan akses pembiayaan kredit perbankan (KUR dan PKBL).
6. Strategi di bidang pakan dalam menghadapi kondisi alam, yaitu melalui penguatan kemandirian dan diversifikasi sumber bahan pakan, dengan tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua komoditas dengan mendorong pemanfaatan bahan lokal dan alternatif (by-product pertanian, sumber protein nonkonvensional), penguatan riset dan inovasi formulasi pakan agar lebih adaptif terhadap fluktuasi kualitas dan ketersediaan bahan pakan dan peningkatan efisiensi penggunaan pakan. Selain itu juga, penguatan sistem cadangan pakan dan bahan pakan yang dikelola secara lebih sistematis untuk kesiapan logistik dan distribusi ketika terjadi kondisi darurat. Peningkatan ketersediaan hijauan pakan melalui penyediaan data potensi lahan untuk penanaman hijauan pakan pada Sistem Informasi Hijauan Pakan (SIHIJAP) yang dapat diakses oleh pelaku usaha peternakan.

7. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain Rupiah Murni dan non APBN antara lain: BLU, PNBPN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerja sama investasi antar negara, dan hibah luar negeri.
8. Pengendalian PHMS yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis risiko pada kabupaten/kota. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi terhadap penyakit prioritas, pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, penguatan kegiatan KIE kepada peternak dan pelaku usaha, penerapan pendekatan kompartementalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, khususnya dalam penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.
9. Penguatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, baik dari sisi peralatan diagnostik, sistem jaminan mutu, maupun jejaring laboratorium, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan UPT lingkup Ditjen PKH melalui proyek SBSN
10. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait untuk sinergitas implementasi kebijakan dan regulasi antar Kementerian/ Lembaga serta koordinasi untuk pengawasan dan penegakan hukum.
11. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan intensif dan berkelanjutan tentang penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan, serta mendorong pelaku usaha produsen untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.
12. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan melalui pembinaan kepada unit usaha pengolahan produk peternakan
13. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, kerjasama dengan negara lain dalam bentuk pelatihan, internship program dan Pendidikan pasca sarjana.
14. Modernisasi peternakan dan Adopsi Teknologi Digital (efisiensi, traceability, keamanan pangan).



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN



LAMPIRAN



Lampiran 1. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging	%	93,94	93,99	100,05
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Telur	%	100,00	100,09	100,09
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu	%	85,43	85,56	100,15
		Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan Terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	%	100,00	100,00	100,00
2	Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	%	73,00	85,72	110,00
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	Kegiatan	5	5	100,00
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	4	4	100,00
3	Penyidikan dan Pengujian Produk	Mutu dan Keamanan Pakan	Produk	3.887	3.887	100,00

Sumber: Ditjen PKH 2025

Lampiran 2. Capaian Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Perlindungan Ternak dari PHMS	Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Daging	%	72,00	71,98	99,97
		Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Susu	%	72,00	79,17	109,96
		Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Telur	%	95,50	93,18	97,57
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Indeks	0,60	0,62	103,33
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Menekan Kasus Positif Rabies pada Hewan	Kabupaten/Kota	100,00	156,00	110,00
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Kegiatan	6	6	100,00
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan	NSPK	3	3	100,00
3	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	4.105.000	4.015.463	97,82
4	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	Sampel	67.172	74.751	110,00
5	Penyidikan dan Pengujian Produk	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	Sampel	2.314	3.185	110,00
6	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	SBSN Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	Unit	1	1	100,00
		SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	Unit	1	1	100,00
		Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia	Unit	1	1	100,00
7	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan	Sarana Bidang Kesehatan Hewan	Unit	9	9	100,00
		Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi	Unit	7.175.105	10.354.092	110,00
		SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	Unit	249	249	100,00
		SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	Unit	1	1	100,00

Sumber: Ditjen PKH 2025

Lampiran 3. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Potensi Produksi Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Pemenuhan Potensi Produksi Ternak untuk Komoditas Daging	%	94,92	103,62	109,17
		Persentase Pemenuhan Potensi Produksi Ternak untuk Komoditas Telur	%	100,00	94,53	94,53
		Persentase Pemenuhan Potensi Produksi Ternak untuk Komoditas Susu	%	21,29	20,17	94,74
2	Tersedianya Bibit/Benih Ternak Bermutu Berdasarkan Kebutuhan Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Ketersediaan Bibit/Benih Ternak Bermutu Terhadap Kebutuhan Produksi Daging	%	86,87	86,72	99,83
		Persentase Ketersediaan Bibit/Benih Ternak Bermutu Terhadap Kebutuhan Produksi Telur	%	100,00	103,67	103,67
		Persentase Ketersediaan Bibit/Benih Ternak Bermutu Terhadap Kebutuhan Produksi Susu	%	0,21	0,41	110,00
3	Terlindunginya Varietas Unggul Tanaman dan Hewan	Jumlah Varietas/Galur Unggul Tanaman dan Hewan untuk Pangan yang Dilepas	Galur/Rumpun	38,00	46,00	110,00
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan	6	6	100,00
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	5	5	100,00
3	Standarisasi Produk	Benih Ternak Unggul	Produk	6.400.800	6.263.500	97,85
		Bibit Ternak Unggul	Produk	1.790.184	1.102.372	61,58
4	Bantuan Produk dan Peralatan	Bantuan Ternak Ruminansia Potong	Ekor	1.000	1.000	100,00
		Bantuan Ternak Unggas	Ekor	496.800	496.800	100,00
		Bantuan Ternak Lainnya	Ekor	100	100	100,00
5	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Prasarana perbibitan ternak	Unit	8	8	100,00
		SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	Unit	5	5	100,00
6	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan	Sarana perbibitan ternak	Unit	19	19	100,00
		SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	Unit	1.172	1.172	100,00

Sumber: Ditjen PKH 2025

Lampiran 4. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Persyaratan Keamanan Komoditas Produk Peternakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Komoditas Produk Peternakan Siap Edar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Komoditas Pangan Terhadap Total Komoditas Produk Peternakan Siap Edar	%	90,50	99,04	109,44
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Zoonosis, Keamanan dan Kesehatan Produk Hewan	Indeks Keamanan dan Kesehatan Produk Hewan	Indeks	0,54	0,61	110,00
		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	%	70,00	75,03	107,19
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Kesejahteraan Hewan Nasional	%	60,00	61,54	102,57
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan	5	5	100,00
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	NSPK	5	5	100,00
3	Penyidikan dan Pengujian Produk	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Produk	37.915	37.915	100,00
4	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	28	28	100,00

Sumber: Ditjen PKH 2025

Lampiran 5. Capaian Kinerja Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Akses Pasar Komoditas Peternakan yang dapat Dimanfaatkan Usaha Peternakan	Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan	%	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	Persentase Komoditas Produk Peternakan yang Memenuhi Persyaratan Mutu Terhadap Total Komoditas Produk Peternakan Siap Edar	%	80,00	82,77	103,46
3	Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan Siap Ekspor	Persentase Produk Komoditas Peternakan Siap Ekspor Terhadap Total Potensi Ekspor Peternakan	%	45,00	46,37	103,04
4	Meningkatnya Komoditas Peternakan Unggulan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	Persentase Komoditas Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Terhadap Total Komoditas Peternakan Unggulan	%	20,00	20,00	100,00
5	Meningkatnya Investasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Investasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	16,26	18,15	110,00
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4	4	100,00
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	3	3	100,00
3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	278	278	100,00

Sumber: Ditjen PKH 2025

Lampiran 6. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	94,15	90,89	96,54
		Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	85,00	100,00	110,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	90,70	91,83	101,25
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert	3,63	3,73	102,75
4	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert	3,28	3,28	100,00
Klasifikasi Rincian Output		Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan	240	235	97,92
		Layanan Hukum	Layanan	1	1	100,00
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	100,00
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100,00
		Layanan Umum	Layanan	28	28	100,00
		Layanan Data dan Informasi	Layanan	39	37	94,87
		Layanan Bantuan Hukum	Layanan	6	6	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	45	45	100,00
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100,00
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan	1.823	1.823	100,00
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	13	13	100,00
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	49	48	97,96
		Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	738	717	97,15

Sumber: Ditjen PKH 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Harsono RM No.3 Gedung C 6-9, Ragunan, Jakarta, 12550

<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>